

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Setiap tahun kebutuhan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus (ABK) semakin meningkat, mengingat semakin banyaknya jumlah ABK. Menurut CNN Indonesia (2017) jumlah ABK di Indonesia mencapai angka 1,6 juta anak, hal ini setara dengan 0,75% data akhir (Badan Pusat Statistik/BPS, 2016). Dengan jumlah ABK yang terus bertambah namun keberadaan SLB yang masih sangat terbatas terutama pada daerah-daerah tertentu dikarenakan keberadaan SLB yang berada di kabupaten/kota dengan jumlah 514 kabupaten/kota, 62 diantaranya belum memiliki SLB, namun agar pendidikan merata termasuk untuk ABK maka muncullah pendidikan inklusif untuk daerah-daerah dengan sekolah reguler namun menjadi penyelenggara pendidikan inklusif dan telah terdaftar sebanyak 32 ribu sekolah reguler yang menjadi sekolah inklusi di berbagai daerah. Sehingga dari jumlah 1,6 juta ABK 18 persen diantaranya baru mengenyam pendidikan, dengan 115 ribu ABK bersekolah di SLB dan 299 ribu ABK bersekolah pada lembaga pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif (Maulipaksi, 2017). Sejalan dengan UU No 20 tahun (2003), Pasal 5 menyatakan bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk mengenyam pendidikan, dan warga Negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, intelektual, mental dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus”.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 Tahun 2009 Pasal (1) tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa bahwa:

Pendidikan inklusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Secara formal pendidikan inklusif ditegaskan dalam pernyataan Salamanca pada Konferensi dunia tentang Pendidikan Khusus tahun 1994 yang menyatakan bahwa

“Prinsip mendasar dari pendidikan inklusif adalah: selama memungkinkan, semua anak seyogyanya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan, ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka” (UNESCO, 1994).

Tidak hanya jenjang pendidikan dasar dan menengah, namun pemerintah Indonesia telah memfasilitasi keberadaan ABK sejak usia dini. Hal ini telah dituangkan pemerintah pada Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pasal 132 yaitu “Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jalur formal diselenggarakan melalui satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, dan satuan pendidikan menengah”. Layanan pendidikan untuk ABK di PAUD dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 146 Tahun 2014 tentang kurikulum PAUD dan Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2013 tentang pengembangan PAUD holistic integratif. Pelayanan ini juga bersifat nondiskriminatif sehingga seluruh anak usia dini dilayani tanpa terkecuali termasuk ABK.

Menurut Kustawan (2012, hlm. 49), satuan pendidikan yang akan menyelenggarakan pendidikan inklusif perlu memenuhi persyaratan diantaranya ijin operasional, mampu merancang dan menggunakan kurikulum fleksibel, tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan prosedur operasi standar, tersedia sarana dan prasarana yang memadai, sumber dana yang menjamin kelangsungan penyelenggara pendidik dan mendapat rekomendasi penerapan sebagai sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Realitasnya, belum semua sekolah reguler menjadi sekolah inklusif dikarenakan berbagai alasan seperti ketidaksiapan pihak sekolah maupun pendidik akan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Sopa (2017) dan Tarnoto (TT) bahwasannya pada tingkat sekolah dasar banyak permasalahan dalam menyelenggarakan sekolah inklusif diantaranya; belum tersedianya guru pembimbing khusus (GPK), kurang tersedia anggaran, ABK masih tersisihkan karena berbagai pihak yang belum dapat menerima keberadaannya, kurangnya kompetensi guru dalam menangani ABK, kurangnya kepedulian orangtua

terhadap ABK, jumlah siswa ABK dalam satu kelas lebih mendominasi, dan kurangnya kerjasama dari berbagai pihak seperti masyarakat, ahli profesional dan pemerintah.

Tidak hanya di Indonesia namun di beberapa negara pun seperti di Skotlandia dalam penelitian Florian (2008) yang menyatakan bahwasannya di Skotlandia, pihak sekolah maupun pendidik masih kebingungan dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif. Meskipun kebijakan pemerintah telah mengharuskan untuk menjadi sekolah inklusif namun banyak kendala dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif seperti salah satunya kurangnya pemahaman pendidik mengenai pendidikan inklusif. Seperti halnya dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Lenakakis, dkk. (2018) di Yunani dan Hornby (2015) di Inggris, juga menunjukkan bahwasannya kesiapan guru sangat mempengaruhi. Sehingga adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah dengan penyelenggaraan sekolah inklusif.

Penelitian terdahulu pun lebih banyak membahas tugas guru pembimbing khusus (GPK) yang sudah terlaksana seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Indriwati (2013), Rahmaniari (2016), Firdaus (2016), Mulyani (2016), dimana semua penelitian tersebut dilakukan pada tingkat sekolah dasar dengan hasil yang sama yaitu GPK telah melakukan asesmen diawal, membuat program pendidikan individu (PPI), melakukan evaluasi, dan menyediakan alat pembelajaran khusus namun untuk koordinasi dengan guru kelas masih belum terlaksana.

Meskipun sudah terdapat banyak penelitian mengenai sekolah inklusif, akan tetapi sebagaimana yang telah dibahas oleh peneliti bahwa penelitian tersebut masih terfokus pada tingkat sekolah dasar (SD) keatas untuk penelitian di PAUD sendiri masih sangat terbatas. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penanganan ABK di sekolah inklusif pada tingkat PAUD. Maka judul penelitian ini **“PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI LEMBAGA PAUD”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Apa saja masalah yang dihadapi dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif di lembaga PAUD?

Annisa Nur Azizah, 2019

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI LEMBAGA PAUD**

Universitas Pendidikan Indonesia | [respository.upi.edu](https://respository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](https://perpustakaan.upi.edu)

2. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif di lembaga PAUD?
3. Apa saja *treatment* yang diberikan untuk ABK pada PAUD inklusi?

### 1.3 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan gambaran penyelenggaraan pendidikan inklusif di PAUD.
2. Untuk memberikan informasi mengenai tantangan yang ada pada PAUD penyelenggara pendidikan inklusif.
3. Untuk memberikan informasi mengenai penanganan yang diberikan pada anak berkebutuhan khusus di PAUD inklusi.

### 1.4 Manfaat

#### a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan ilmu pengetahuan tentang penanganan ABK di sekolah inklusif.

#### b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi peneliti, penelitian ini menambah pengalaman dan pengetahuan mengenai sekolah inklusif baik dari seperti apa sekolah inklusif, tantangan, dan penanganan yang diberikan pada anak berkebutuhan khusus di PAUD inklusi.
- 2) Bagi guru, penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk menjadi pendidik yang lebih memahami akan kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikannya.
- 3) Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk mewujudkan sekolah inklusif yang berhasil.

### **1.5 Struktur Organisasi Skripsi**

Berikut di bawah ini adalah gambaran umum dari bab ke bab isi dari penulisan skripsi ini :

BAB I Pendahuluan, mengemukakan tentang latar belakang penelitian, rumusan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi.

BAB II Kajian Pustaka, membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penganan anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif.

BAB III Metode Penelitian, membahas mengenai desain penelitian, partisipan dan tempat penelitian, penjabaran istilah, kisi-kisi instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV Temuan dan Pembahasan, membahas mengenai hasil penelitian serta pembahasannya mengenai hasil temuan penelitian.

BAB V Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi, berisi tentang kesimpulan dari seluruh hasil pengolahan data, implikasi yang diberikan kepada pihak terkait, berikut rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.